

Ke-Indonesiaan dalam bingkai Bahasa Indonesia

Nadra

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang

Email: nadra@hum.unand.ac.id

1. Pendahuluan

Dalam menyambut bulan bahasa ini, penulis diminta untuk menyajikan makalah dengan judul “Keindonesiaan dalam Bingkai Bahasa dan Sastra Indonesia”. Untuk itu, ada empat istilah utama yang perlu dibahas, yaitu *keindonesiaan*, *bingkai*, *bahasa*, dan *sastra Indonesia*. Secara umum, *keindonesiaan* berarti ‘perihal Indonesia; yang bersangkutan paut dengan Indonesia’ (KBBI, 2008:533). *Bingkai* berarti ‘bilah (papan, rotan) yang dipasang di sekeliling suatu benda supaya kuat’ (KBBI, 2008:195). *Bahasa* berarti ‘sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri’ (KBB, 2008, 116). Terakhir, *sastra Indonesia* adalah sastra yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia dan dalam pengertian klasik adalah sastra yang ditulis dalam semua bahasa daerah yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia (KBBI, 2008:1230). Terkait dengan kedua istilah terakhir, yakni bahasa dan sastra Indonesia, maka yang dimaksud dengan keindonesiaan di sini adalah semua aspek yang bersangkutan paut dengan bahasa dan sastra Indonesia. Secara lebih khusus, yang dimaksudkan dengan bingkai di sini adalah garis batas yang di dalamnya tercakup tempat dituturkan dan berkembangnya bahasa dan sastra Indonesia yang dikenal dengan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Meskipun masalah yang dikemukakan ini bukanlah hal yang baru, namun pembicaraan tentang masalah ini akan selalu menarik dan tidak akan habis-habisnya karena masalah ini selalu mengalami perkembangan atau perubahan mengikuti perkembangan atau perubahan yang terjadi pada para penuturnya. Pembicaraan ini juga sangat relevan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda dan dalam rangka membangun rasa nasionalisme di tengah-tengah globalisasi yang sedang

melanda semua aspek kehidupan ini. Namun demikian, pada kesempatan ini pembicaraan akan difokuskan hanya pada keindonesiaan dalam bingkai bahasa Indonesia.

Pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi, dan bahasa nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Mendikbud pada acara puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2017 dan Pencanangan Gerakan Literasi Nasional di Plaza Insan Berprestasi, merupakan sebuah ijtihad yang luar biasa dan pilihan yang sangat strategis. Hal itu tentu saja dapat menjadikan masyarakat yang berasal dari berbagai bahasa untuk merasa berada dalam satu bingkai yang sama, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, “Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

Dengan demikian, beban yang dipikul oleh bahasa Indonesia, bukanlah beban yang ringan, melainkan beban yang amat berat. Hal itu dapat dilihat dari fungsi yang diembannya, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa Negara, Bab III, pasal 25 ayat 2, yaitu sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selanjutnya, pada pasal 25 ayat 3 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Sesuai dengan judul makalah ini, selanjutnya, pembicaraan akan difokuskan pada masalah keindonesiaan dalam bingkai bahasa Indonesia. Secara lebih khusus, pembicaraan difokuskan pada beberapa aspek yang bersangkutan paut dengan Indonesia dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia yang digunakan dan berkembang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keindonesiaan dalam Bingkai Bahasa Indonesia

Berbicara tentang Indonesia berarti berbicara tentang suatu bangsa. Jati diri suatu bangsa dikenal melalui bahasanya. Oleh sebab itu, membicarakan bahasa merupakan salah satu usaha untuk mengenal jati diri bangsa. Bangsa Indonesia dapat

dimasukkan ke dalam satu “bingkai” NKRI karena menggunakan bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting artinya sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda (tahun 2018 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mengidentifikasi sejumlah 668 bahasa di Indonesia). Antara satu suku dengan suku lainnya atau antara penutur suatu bahasa dengan penutur bahasa lainnya tidak saling memahami jika mereka sama-sama bertutur dengan bahasa mereka masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting.

Para pejuang terdahulu telah mendudukkan fondasi yang kuat tentang bahasa Indonesia. Hal itu dinyatakan dalam bentuk “Sumpah Pemuda” pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, secara resmi dinyatakan di dalam Undang-undang Dasar 1945, Bab XV, pasal 36 bahwa “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”.

Gunarwan (2000) menyatakan bahwa peran bahasa lebih subtil sebab bahasa—seperti juga kebudayaan, agama, dan sejarah—merupakan komponen nasionalisme. Selanjutnya, dinyatakan oleh Gunarwan bahwa peran lain yang dipunyai bahasa dalam kaitannya dengan nasionalisme adalah apa yang disebut oleh Garvin dan Mathiot (1956), yaitu fungsi pemersatu dan pemisah. Dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia, fungsi pemersatu itulah yang perlu dibina agar semua warga negara merasa anggota satu bangsa yang sama. Sebagai komponen nasionalisme Indonesia, bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam mempersatukan semua golongan atau kelompok etnik yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, implikasinya, menurut Gunarwan, adalah bahwa untuk memperkuat persatuan Indonesia, harus memperkuat bahasa Indonesia dalam arti terus membina dan mengembangkannya.

Sampai saat ini pernyataan Sumpah Pemuda sudah berjalan selama 91 tahun. Dalam perjalanannya tentu ada kendala yang dihadapi. Kendala tersebut bukan saja disebabkan oleh masalah bahasa itu sendiri, melainkan juga disebabkan oleh masalah-masalah lainnya, seperti politik, sikap penuturnya, ranah penggunaannya, dan perkembangan teknologi informasi.

Yogie (1998:40) mengemukakan dalam makalahnya tentang “Peran Bahasa Indonesia dalam Kesatuan dan Persatuan Bangsa” bahwa ada berbagai masalah yang dijumpai yang berkaitan dengan bahasa nasional, yaitu: (1) Penggunaan bahasa

nasional yang belum sempurna sebagai sarana pembangunan bangsa, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana kehidupan dan pembinaan kebudayaan bangsa dan (2) Sebagian masyarakat ada yang kurang bergairah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku serta sebagian lainnya masih belum mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Selanjutnya, Yogie (1998:41--42) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu: (1) faktor geografis yang menyangkut daerah terpencil;

(2) faktor demografis karena mereka hidup hanya di antara suku mereka saja; dan (3) faktor psikososial kultural, khusus untuk mereka yang berstatus asing dan sangat terikat pada rumpun asalnya, walaupun sudah berpuluh tahun tinggal di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya perlu kemauan politik baru untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa seluruh rakyat Indonesia yang dapat dibanggakan. Kemajuan pembangunan seharusnya menyangkut pula kebanggaan semua lapisan masyarakat untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Segala keterpencilan harus diatasi. Kualitas persatuan dan kesatuan yang diikat tanpa ikatan bahasa akan memperlihatkan penurunan karena dalam bahasa tercermin cara berpikir dan cara yang mengandung muatan perasaan.

Hal yang menarik juga adalah pernyataan Gunarwan (2000) tentang hasil penelitian yang dilakukannya pada tahun 1993 yang menunjukkan bahwa di kalangan orang Indonesia ada kecenderungan menggunakan bahasa Inggris dinilai lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia. Hal itu, menurutnya, dapat mengurangi loyalitas orang Indonesia pada bahasa Indonesia dan dapat menurunkan kadar nasionalisme orang Indonesia. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa hal itu dapat diinferensikan bahwa salah satu butir Sumpah Pemuda, yakni “menjunjung bahasa persatuan” menjadi kurang wujud: junjungannya menjadi kurang tinggi.

Ada anggapan sebagian masyarakat Indonesia bahwa menggunakan bahasa Inggris lebih mempunyai nilai jual, lebih berprestise, lebih intelek, dan lebih gaya, walaupun kenyataannya penguasaan bahasa Inggris mereka sebenarnya juga jauh dari yang diharapkan. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah sikap mereka yang tidak mempunyai kebanggaan terhadap bahasa nasionalnya sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mereka kurang memiliki rasa nasionalisme terhadap bahasa nasional mereka. Lagi pula, mereka dapat dikatakan tidak paham dengan fungsi dan kedudukan

bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia sebagaimana yang telah dinyatakan dalam *Politik Bahasa Nasional* (Halim, 1984). Menyangkut sikap bahasa ini, Halim (1979) dan Moeliono (1985) membaginya atas tiga, yaitu mencakup:

1) sikap kesetiaan bahasa, 2) sikap kebanggaan bahasa, dan 3) sikap kesadaran akan norma dan kaidah bahasa baku.

Di samping masalah yang telah dikemukakan di atas, juga ditemukan penggunaan kata atau istilah asing yang sebenarnya tidak perlu digunakan sebab telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya: *microphone* (padanannya *pelantang*), *break* (padanannya *istirahat*), *download* (padanannya *unduh*), *upload* (padanannya *unggah*), dan *klik* (padanannya *tekan*).

Ada pula bentuk-bentuk yang sudah diindonesiakan sesuai dengan kaidah yang dibakukan, namun dilafalkan atau dibaca dengan cara yang tidak sesuai (keinggris-ingrisan), seperti: *proyek* (dibaca *projek*), *Cina* (dibaca *Caina*), *universitas* (dibaca *yuniversitas*), *energi* (dibaca *enerji*), *gender* (dibaca *jender*), *subjek* (dibaca *sabjek*), *publik* (dibaca *pablik*), *unit* (dibaca *yunit*), dan *final* (dibaca *fainal*). Jika dikaji lebih jauh, hal tersebut tentu menyalahi kaidah fonologi bahasa Indonesia. Secara fonetis, dalam kaidah bahasa Indonesia, apa yang tertulis itu pula yang dilafalkan. Dengan kata lain, ucapan sama dengan yang dituliskan. Hal itu tentu saja merusak tatanan atau kaidah yang sudah baku (standar) dalam bahasa Indonesia. Konsekuensinya adalah, baik pengajar maupun pembelajar akan mendapat kesulitan dalam pengajaran bahasa Indonesia, terutama dalam pelajaran membaca dan melafalkan kata.

Masalah lain yang terjadi adalah terlalu besarnya pengaruh bahasa Indonesia yang tidak resmi dan bahasa daerah, terutama dialek Jakarta, seperti yang digunakan dalam sinetron-sinetron dan tayangan di televisi dalam penggunaan bahasa Indonesia resmi. Hal itu disebabkan oleh kecerobohan atau kurangtelitian, kurangpahaman, atau ketidakpedulian akan laras bahasa yang digunakan. Oleh sebab itu, masuklah antara lain kosakata: *merubah*, *ditentuin*, *gunain*, *kayak*, *nggak*, *udah*, *pengin*, *nyokap*, *cuman*, dan *emang* ke dalam bahasa Indonesia resmi yang seharusnya bentuk yang digunakan itu adalah *mengubah*, *ditentukan*, *menggunakan*, *seperti*, *tidak*, *sudah*, *ingin*, *ibu*, *cuma*, dan *memang*.

Begitu juga dengan perkembangan bahasa Indonesia dalam pasar global, seperti dalam bisnis *online* atau *e-commerce*, hampir tidak digali dari bahasa Indonesia sendiri, melainkan lebih berkiblat pada bahasa asing, khususnya bahasa

Inggris. Sebagai contoh, dalam salah satu promosi di bisnis *online* dan pasar modern (supermarket) tertulis *man kemeja/pc*. Dari istilah yang digunakan terlihat bahwa penggunaan kosakata bahasa Inggris sangat dominan. Sebagaimana diketahui bahwa kata *man* yang digunakan berarti ‘laki-laki’ yang notabene ada dalam bahasa Indonesia. Demikian juga kata *pc* yang merupakan singkatan dari *peace* yang juga diambil dari bahasa Inggris, merupakan kata penggolong benda yang digunakan untuk menghitung kemeja. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya kata penggolong benda untuk menghitung kemeja itu juga ada, yakni *helai* (lihat Nadra dkk., 2013)

Selanjutnya, hasil penelitian Nadra dan Wahyuni (2014) tentang pembangunan karakter bangsa melalui kajian variasi kata penggolong benda dalam jual beli di pasar modern, seperti *hypermarket*, di dua kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta dan Surabaya, menunjukkan bahwa kata penggolong benda bahasa Indonesia cenderung hilang dan digantikan oleh kata penggolong yang berasal dari bahasa Inggris. Contohnya, kata penggolong benda *helai*, *kotak*, *kaleng*, *botol*, dan *ikat* digantikan dengan *pc/pcs*. Dengan demikian, kekayaan kosakata yang dimiliki bahasa Indonesia tentang kata penggolong benda cenderung hilang karena digantikan oleh bahasa Inggris. Lagi pula, penggunaan bahasa Inggris tersebut juga tidak konsisten sebab untuk jamak digunakan juga bentuk *pc*, atau sebaliknya, untuk tunggal digunakan juga bentuk *pcs*.

Terkait dengan mutu penggunaannya, masalah yang terjadi adalah terlalu besarnya pengaruh bahasa Indonesia yang tidak resmi atau nonstandar ke dalam penggunaan bahasa resmi. Begitu pula dengan pengaruh bahasa daerah, seperti dialek Jakarta yang digunakan dalam sinetron-sinetron dan tayangan di televisi ke dalam penggunaan bahasa Indonesia resmi. Hal itu disebabkan oleh kecerobohan atau kekurangtelitian, kekurangpahaman, atau ketidakpedulian akan laras bahasa yang digunakan.

Bentuk-bentuk sebagaimana dikemukakan di atas tidak hanya digunakan oleh siswa/mahasiswa, melainkan juga digunakan oleh guru/dosen, serta aparat/pejabat negara. Begitu juga dengan tokoh masyarakat lainnya. Hal itu terjadi, tidak lain karena pengguna bahasa Indonesia tersebut tidak mempunyai sikap bahasa yang positif, seperti yang dikemukakan oleh Halim (1979) dan Moeliono (1985), di antaranya adalah tidak mempunyai sikap kesadaran akan norma dan kaidah bahasa Indonesia baku.

Fasli Djalal, yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional, dalam acara peresmian Gedung Pusat Bahasa Universitas Andalas pada

bulan April tahun 2010, mengatakan bahwa “kita harus mumpuni dalam menggunakan bahasa Indonesia dan mampu berbahasa asing untuk pergaulan internasional”. Bahkan dalam sambutan Presiden Republik Indonesia, Soeharto, pada peringatan hari Sumpah Pemuda ke-65, pembukaan Kongres KNPI VII, dan Kongres Bahasa Indonesia VI pada tanggal 28 Oktober 1993 di Jakarta sudah dinyatakan bahwa “Penguasaan dan kemampuan bahasa asing itu janganlah sampai melunturkan rasa hormat kita terhadap bahasa nasional kita sendiri. Penguasaan dan pengetahuan bahasa asing yang kita miliki jangan pula memperkecil peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sebagai bangsa.” (dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, 1998:3).

Hal yang menarik juga disimak adalah diskusi yang dilakukan oleh Damshauer (2011), salah seorang dosen bahasa Indonesia di Universitas Bonn, Jerman, dengan mahasiswanya. Menurut kesan mahasiswanya, “bahasa Indonesia yang digunakan para penulis Indonesia, termasuk wartawan dan politikus, jauh dari baik dan benar, bahkan sering mengabaikan logika kalimat”. Pernyataan mahasiswa tersebut menggambarkan bahwa mutu penggunaan bahasa Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

Dengan demikian, perlu kesadaran dari semua pihak sehingga masalah-masalah yang ada saat ini tidak hanya dibebankan kepada guru/ahli bahasa Indonesia saja. Jika hal itu tidak dilakukan, bangsa Indonesia tinggal menunggu saat kehilangan jati diri dan bahasa Indonesia akan dilecehkan. Untuk itu, penggunaan variasi bahasa yang sesuai dengan larasnya mutlak diperlukan.

Sejalan dengan itu, Utorodewo (2002) menyatakan bahwa laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini dikenal berbagai laras, seperti laras iklan, laras lagu, laras ilmiah, laras ilmiah populer, laras komik, laras sastra yang masih dapat dibagi lagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Setiap laras memiliki ciri dan gaya tersendiri. Mutu penggunaan bahasa Indonesia akan tercermin dari penggunaan laras bahasa yang sesuai dengan tujuan dan khalayak sarannya.

Di samping itu, mutu penggunaan bahasa Indonesia juga tergambar dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta yang sesuai dengan logika. Pengertian *bahasa yang baik dan benar* harus ditinjau dari dua aspek, yaitu bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang baik, seperti dikemukakan oleh Sugono (1999:21), adalah ketepatan memilih ragam

bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Pemilihan itu bertalian dengan topik yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak berbicara (kalau lisan) atau pembaca (jika tulis), dan tempat pembicaraan. Selain itu, bahasa yang baik itu bernalar, dalam arti bahwa bahasa yang digunakan logis dan sesuai dengan tata nilai masyarakat pengguna bahasa tersebut. Yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang benar adalah penerapan bahasa yang sesuai dengan kaidah, yang meliputi masalah ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan tata bahasa.

Bila ditinjau dari segi jumlah penuturnya, seperti dinyatakan oleh Perambahan dalam *Kompas* (12 Juni 2009), bahasa Indonesia berada pada urutan ke-7 dengan jumlah penutur sekitar 259 juta orang. Jumlah tersebut mungkin bisa bertambah karena sejak tahun 2007 bahasa Indonesia telah ditetapkan pula sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam (Sumber: Asal-usul.com). Sementara, Haq (2011) menyatakan bahwa bahasa Indonesia menempati urutan kesembilan penutur terbanyak di dunia. Selain itu, Collins (2011:104) memperkirakan jumlah penutur bahasa Indonesia (termasuk Melayu) dengan semua variannya pada tahun 2020 adalah sekitar 300 juta berdasarkan perkiraan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk di Asia Tenggara, serta memperhitungkan bencana alam dan penyakit yang tidak terduga. Berdasarkan jumlah penutur tersebut, Fatimah (2011) menyatakan bahwa bahasa Indonesia memenuhi syarat untuk menjadi bahasa dunia.

Nadra (2012) juga menyatakan bahwa bahasa Indonesia juga digunakan di Timur Tengah, terutama di Mekah dan Medinah. Kedua kota suci ini merupakan tujuan utama umat Islam untuk beribadah dan orang yang berasal dari Indonesia merupakan yang terbanyak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada umumnya orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu menyebabkan pedagang di kedua kota suci itu juga terdorong untuk berbicara dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian, dalam jual beli digunakan bahasa Indonesia. Selain itu, di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, banyak tenaga kerja Indonesia (TKI), mahasiswa, dan tenaga terdidik lainnya. Komunikasi antarsesama orang Indonesia tersebut masih tetap menggunakan bahasa Indonesia.

Menurut Jose (2011), fakta yang menarik tentang bahasa Indonesia antara lain adalah bahwa bahasa Indonesia juga mendunia di dunia maya. Buktinya, wikipedia berbahasa Indonesia telah menduduki peringkat 26 dari 250 wikipedia berbahasa asing di dunia dan peringkat 3 di Asia setelah bahasa Jepang dan Mandarin. Selain itu,

bahasa Indonesia juga menjadi bahasa ke-3 yang paling banyak digunakan dalam postingan *blog* di *wordpress*.

Semua yang dikemukakan di atas, merupakan faktor yang memungkinkan bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa internasional. Namun demikian, hal itu tidaklah dengan serta merta menjadikan bahasa Indonesia dapat menyandang predikat sebagai bahasa internasional. Ada beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia saat ini dan merupakan tantangan bagi perkembangan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang, seperti maraknya penggunaan istilah asing, sikap dan kebanggaan para penuturnya, dan mutu penggunaannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Penggunaan istilah asing merupakan salah satu faktor yang patut mendapat perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh penggunaan istilah asing itu seolah-olah tidak ada aturannya. Setiap penutur seolah-olah bebas menggunakan istilah tersebut, padahal aturannya sudah digariskan dalam buku *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (2001) yang telah disusun oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia di bawah lembaga resmi pemerintah yang bernama Pusat Bahasa (sekarang berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).

Dalam buku pedoman tersebut dijelaskan bahwa sumber istilah itu yang utama adalah yang berasal dari kosakata bahasa Indonesia sendiri, dan selanjutnya secara berturut-turut adalah yang berasal dari kosakata bahasa serumpun dan yang berasal dari kosakata bahasa asing. Masing-masingnya juga ada persyaratannya. Dalam kenyataannya, pedoman tersebut sering diabaikan, entah karena kealpaan penuturnya atau karena ketidaktahuan atau pun karena faktor yang lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan istilah asing adalah adanya anggapan sebahagian masyarakat Indonesia bahwa menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, lebih mempunyai nilai jual, lebih berprestise, lebih intelek, dan lebih gaya, walaupun kenyataannya penguasaan bahasa Inggris mereka sebenarnya juga jauh dari yang diharapkan. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah sikap mereka yang tidak mempunyai kebanggaan terhadap bahasa nasionalnya sendiri. Lagi pula, mereka dapat dikatakan tidak paham dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia sebagaimana yang telah dinyatakan dalam *Politik Bahasa Nasional* (Halim, 1984).

Berdasarkan kenyataan di atas, perlu dilakukan usaha pengembangan dan pembinaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara terus-menerus. Usaha yang

dilakukan untuk pengembangan bahasa Indonesia tersebut antara lain adalah program Darmasiswa RI, yaitu suatu program pemberian beasiswa terhadap semua siswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Melalui program tersebut diharapkan bahasa Indonesia bisa berkembang menjadi bahasa internasional. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan sikap positif orang Indonesia sendiri terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya. Hal ini, menurut Collins (2011), yang akan menentukan apakah bahasa Indonesia akan menjadi bahasa dunia atau akan kalah dari bahasa Inggris.

Sejalan dengan hal di atas, pada Kongres Bahasa Indonesia ke-XI tanggal 28—31 Oktober tahun lalu (2018) yang bertema “Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia”, telah disepakati 22 rekomendasi yang akan dilaksanakan. Salah satu di antaranya adalah pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat harus meningkatkan kebanggaan berbahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan seiring dengan peningkatan penguasaan bahasa daerah dan bahasa asing.

3. Penutup

Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi, dan bahasa nasional, dapat menjadikan masyarakat yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda, merasa berada dalam satu bingkai yang sama, yang dikenal dengan Indonesia atau lebih tepatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari segi jumlah penuturnya, penutur bahasa Indonesia juga sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahasa internasional. Sebaliknya, penggunaan bahasa Indonesia juga menghadapi berbagai masalah. Hal itu merupakan tantangan bagi perkembangan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang, seperti maraknya penggunaan istilah asing, sikap para penuturnya yang belum begitu baik, dan masih rendahnya mutu penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan istilah asing perlu dibatasi sesuai dengan pedoman yang ada, perlu ditanamkan sikap positif dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, dan mutu penggunaannya juga perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Hal itu sangat penting dilakukan mengingat keberadaan bahasa Indonesia dari sisi keindonesiaan dan besarnya peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Collins, James T. 2011. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia: Sejarah Singkat*. Jakarta: KITLV-Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damshauser, Berthold. 2011. “Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Dunia”, *Majalah Tempo*, 14 November.
- Fatimah, Susi. “Bahasa Indonesia Penuhi Syarat Jadi Bahasa Dunia”. (Okezone, 17 Januari 2011).
- Gunarwan, Asim. 2000. “Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di dalam Era Globalisasi”, *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Halim, Amran. 1979. “Sikap Bahasa dan Pelaksanaan Kebijakan Bahasa Nasional”, *Pembinaan Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran. 1984. “Fungsi Politik Bahasa Nasional” dalam *Politik Bahasa Nasional*. (Amran Halim, ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Haq, Muhammad Ammar. “Bahasa Indonesia Urutan Kesembilan Penutur Bahasa Terbanyak di Dunia. (Blokdetik.com, 15 September 2011).
- Jose. *News and Entertainment Online*. (Blognya Jose, 29 Desember 2011). Kongres Bahasa Indonesia XI, Jakarta, 28—31 Oktober 2018.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Nadra. 2012. “Bahasa Indonesia: Peluang dan Tantangan”. *DMIT International Conference: Issues and Challenges in Malay-Indonesian Studies*. Yongin: Hankuk University of Foreign Studies.
- Nadra, Sri Wahyuni, dan Mahsun. 2013. “Pembangunan Karakter Bangsa melalui Kajian Variasi Kata Penggolong Benda”. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. Padang: Universitas Andalas.
- Nadra dan Sri Wahyuni. 2014. “Utilization Strengthening National Identity of Numeral Classifier Words in Trading at Modern Market”, *Proceeding of The 3rd International Seminar on Languages and Arts (ISLA-3)*. Padang: Faculty of Languages and Arts, State Univesity of Padang.
- Sugono, Dendy. 1999. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Puspa
- Swara. Tim Pemetaan Bahasa. 2018. *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tim Pengembangan Bahasa Indonesia. 2001. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta.

Utorodewo, Felicia N. 2002. "Bahasa dan Tulisan Ilmiah". Makalah yang disajikan dalam Pelatihan dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Berakreditasi. Jakarta, PPPG Bahasa, 24—27 April.

Nadra, Keindonesiaan dalam Bingkai Bahasa Indonesia...

Yogie S.M., M. 1998. “Peranan Bahasa Indonesia dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, dalam *Bahasa Indonesia menjelang Tahun 2000. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.